

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019-2023

Mega Tunjung Hapsari<sup>1</sup>, Sindy Sephya Dwi Ayunda<sup>2</sup>, Dewi Syahira<sup>3</sup>,  
Khairunnisa Diva Azhari<sup>4</sup>, Aulia Rahmadita<sup>5\*</sup>, Adellia Salma Nur'aini Supit<sup>6</sup>

**Abstract:** Fiscal performance of local government is a description of the ability of local government to optimize financial resources so that they can be utilized effectively and efficiently. The purpose of this study is to analyze the financial performance of the Jombang Regency government in 2019-2023. This study uses a mix method or mixed method research, an approach that combines quantitative and qualitative methods in a series of studies. The data used were obtained from the Central Statistics Agency of Jombang Regency. The results of the study showed that the analysis of the decentralization degree ratio was 20.96%, meaning sufficient performance. Analysis of the level of regional financial independence was 25.3%, meaning low performance with an advisory relationship pattern. Analysis of the BMTB ratio was 11.58% with good performance. Analysis of the BL and BTL ratios were 55.55% and 44.43% with good performance. The tax revenue effectiveness ratio was 92% with effective performance. The PAD efficiency ratio was 89.23% with inefficient performance. The PAD effectiveness ratio was 113.64% with effective performance.

**Keywords:** *analysis, financial ratio analysis, treasury performance*

**Abstrak:** Kinerja fiskal Pemerintahan daerah merupakan gambaran kemampuan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber daya keuangan sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2019 – 2023. Dalam penelitian ini menggunakan metode mix method atau penelitian metode campuran, adalah pendekatan yang menggabungkan metode kuantitatif dan metode kualitatif dalam satu rangkaian penelitian. Data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis rasio derajat desentralisasi sebesar 20,96% artinya kinerja cukup. Analisis tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 25,3% artinya kinerja rendah dengan pola hubungan hubungan penasehat. Analisis rasio BMTB sebesar 11,58% dengan kinerja baik. Analisis rasio BL dan BTL sebesar 55,55% dan 44,43% dengan kinerja baik. Rasio efektifitas penerimaan pajak sebesar 92% dengan kinerja efektif. Rasio efisisen PAD sebesar 89,23% dengan kinerja tidak efisien. Rasio efektifitas PAD sebesar 113,64% dengan kinerja efektif.

**Kata kunci:** *analisis, analisis rasio keuangan, kinerja keuangan*

### Latar Belakang

Pemberdayaan daerah untuk membuat keputusan suatu daerah agar daerah tersebut menjadi lebih baik dan pengelolaan sumber

daya yang dimilikinya sesuai dengan prioritas, kepentingan, dan potensinya dikenal sebagai otonomi daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah diberikan ke-



bebasan dalam pengelolaan sumber daya dan bertanggung jawab kepada rakyat (Irnawati, dkk, 2023).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen penting yang menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pelayanan publik di era otonomi daerah. Dalam rangka mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Jombang sebagai salah satu daerah otonom harus melakukan analisis atas laporan keuangannya. Untuk menilai kapasitas daerah dalam menghasilkan pendapatan, mendistribusikan pengeluaran, dan mencapai kemandirian fiskal, analisis ini menjadi sangat penting.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jombang menurut Data dari Laporan Kinerja Instransi Pemerintahan (LKIP) BPKAD Kabupaten Jombang 2023 adalah sejumlah 82%. Artinya, kinerja pengelolaan tersebut termasuk ke dalam golongan sangat baik. Oleh karena itu, perlu adanya analisis untuk memastikan kinerja keuangan benar-benar tergolong sangat baik. Dan perlu adanya evaluasi juga untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan tersebut agar kedepannya pengelolaan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan, menginterpretasikan angka-angkanya, menilainya, dan menggunakan data yang disediakan untuk mengambil keputusan (Mahmudi, 2016) dalam (Siswanto dan Maylani, 2022). Pengukuran kinerja pemerintah daerah memiliki berbagai tujuan, termasuk untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas. Akuntabilitas bukan hanya menunjukkan bagaimana dana publik digunakan, tetapi juga membuktikan bahwa dana tersebut telah dibelanjakan dengan cara yang ekonomis, efek-

tif, dan efisien. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan melalui beberapa metode, salah satunya yaitu analisis rasio keuangan.

Ada beberapa pendekatan rasio keuangan dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah, diantaranya yaitu rasio derajat desentralisasi, yang menunjukkan seberapa besar pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD); rasio kemandirian keuangan, yang menunjukkan seberapa besar ketergantungan daerah terhadap sumber-sumber pendanaan dari luar; rasio pertumbuhan belanja, yang mengukur dinamika belanja daerah; rasio belanja modal terhadap total belanja, yang menunjukkan seberapa penting pembangunan infrastruktur; serta rasio belanja langsung dan tidak langsung, yang menunjukkan seberapa baik alokasi anggaran, rasio efektivitas penerimaan pajak yang memperlihatkan seberapa baik pemerintah daerah Kabupaten Jombang merealisasikan pendapatan asli daerah dari pajak, rasio efisiensi PAD yang memberikan gambaran mengenai kinerja dan potensi pengelolaan pendapatan, serta rasio efektivitas PAD yang menunjukkan seberapa efektif suatu daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai program pemerintah serta pelayanan masyarakat.

Pemeriksaan menyeluruh terhadap statistik keuangan ini akan memberikan gambaran yang luas tentang situasi keuangan Kabupaten Jombang, menunjukkan kelebihan dan kekurangan pengelolaan keuangan daerah, dan memberikan dasar untuk pilihan strategis dalam penganggaran dan perencanaan di masa depan. Evaluasi kinerja keuangan periode 2019-2023 sangat penting untuk menilai tren dan perkembangan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jombang, serta mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan dan juga peningkatan.

Dalam jurnal ini akan membahas mengenai beberapa analisis rasio. Yang pertama analisis rasio derajat desentralisasi. Kedua analisis rasio kemandirian keuangan. Ketiga analisis rasio pertumbuhan belanja. Keempat analisis rasio belanja modal terhadap total belanja. Kelima analisis rasio belanja langsung dan tidak langsung. Keenam analisis rasio efektivitas penerimaan pajak. Ketujuh analisis rasio efisiensi PAD. Dan yang terakhir analisis rasio efektivitas PAD. Adapun tujuan dari pembuatan jurnal ini adalah menambah wawasan pembaca mengenai analisis rasio keuangan pemerintah. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap masyarakat mengenai posisi keuangan Kabupaten Jombang, dan dapat lebih memahami mengenai rasio-rasio keuangan tersebut.

### Studi Literatur

#### Pengertian Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah alat analisis yang penting dalam menampilkan kinerja suatu perusahaan dengan membandingkan berbagai angka dari laporan keuangan. Melalui rasio-rasio ini, seperti rasio likuiditas, profitabilitas, *leverage*, dan efisiensi, kita dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, menghasilkan laba, serta mengelola utang dan aset. Misalnya, rasio likuiditas membantu menilai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek, sementara rasio profitabilitas menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, analisis rasio keuangan menjadi alat yang krusial bagi investor, manajer, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategis.

#### Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Konsep PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai potensi yang dimiliki, tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. PAD terdiri dari beberapa komponen utama, seperti pajak daerah, retribusi atas jasa atau pelayanan, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain yang sah. Dengan meningkatkan PAD, pemerintah daerah dapat memperkuat kemandirian fiskal dan kemampuan dalam membiayai program-program serta pembangunan lokal. Hal ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat, sehingga daerah dapat lebih efektif dalam menanggapi kebutuhan masyarakat dan manusia.

Konsep APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) menunjukkan bahwa APBD merupakan dokumen perencanaan yang vital bagi pemerintah daerah, yang mencakup rencana pendapatan dan belanja selama anggaran satu tahun. Dalam konteks ini, APBD berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif, merencanakan program pembangunan, dan memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Proses penyusunannya melibatkan berbagai tahapan, termasuk partisipasi masyarakat dan pengesahan oleh DPRD, yang bertujuan untuk menciptakan anggaran yang mencerminkan kebutuhan lokal. Selain itu, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi kunci dalam pengelolaan APBD untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, tantangan seperti kapasitas pengelolaan yang terbatas dan pendapatan sering kali menghambat

efektivitas APBD dalam mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan

### Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Patarai (2017) berpendapat bahwa kinerja kemampuan daerah menjadi salah satu indikator penting untuk melihat keberhasilan suatu wilayah dalam melaksanakan target pembangunannya yang mengacu pada sistem pemerintahannya. Oleh karena itu, dalam penelitian artikel ini penulis memberikan kajian terkait dengan delapan rasio yang dipergunakan saat analisis kemampuan keuangan di kabupaten Jombang, berikut diantaranya yaitu sebagai berikut ini.

### Rasio Derajat Desentralisasi

Dalam Rasio ini menggambarkan seberapa keunggulan disuatu wilayah dalam membiayai aktivitas pendanaannya menggunakan pengukuran terkait dengan perbandingan antara PAD dan total pendapatan keseluruhan daerah. Semakin besar keterlibatan PAD, maka semakin kuat suatu wilayah dalam menerapkan desentralisasinya, sehingga menyebabkan berpengaruhnya kinerja penyelenggaraan desentralisasi pada wilayah tersebut. (Rohmad, Isma, dan Ramli, 2023). Penghitungan analisis adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Terdapat beberapa pengelompokan dalam menentukan standar proporsi, yakni:

1. 0,0% - 10,0%, diasumsikan bahwa kinerja desentralisasi tergolong sangat kurang
2. 10,1% - 20,0%, diasumsikan bahwa kinerja desentralisasi tergolong kurang
3. 20,1% - 30,0%, diasumsikan bahwa kinerja desentralisasi tergolong cukup
4. 30,1% - 40,0%, diasumsikan bahwa kinerja desentralisasi tergolong sedang
5. 40,1% - 50,0%, diasumsikan bahwa kinerja desentralisasi tergolong baik

6. > 50,0%, diasumsikan bahwa kinerja desentralisasi tergolong sangat baik

### Rasio Kemandirian Keuangan

Dalam menganalisis rasio ini, memperlihatkan sejauh mana keahlian pemerintah di suatu wilayah dalam membiayai sendiri aktivitas pendanaan di pemerintahannya. Rasio ini dihitung dengan perbandingan antara PAD dengan perolehan royalti sumber lain seperti bantuan dan pinjaman. Penghitungan dalam analisis ini sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Terdapat beberapa pengelompokan untuk menentukan kriteria kinerja pengukuran analisis ini, yakni:

1. 0,0% – 25,0%, diasumsikan bahwa kemandirian pendanaan daerah tergolong rendah sekali (instruktif)
2. 25,1% – 50,0%, diasumsikan bahwa kemandirian pendanaan daerah tergolong rendah (konsultatif)
3. 50,1% – 75,0%, diasumsikan bahwa kemandirian pendanaan daerah tergolong (partisipatif)
4. > 75%, diasumsikan bahwa kemandirian pendanaan daerah tergolong tinggi (delegatif).

### Rasio Pertumbuhan Belanja

Menurut Awani dan Hariani (2021) rasio pertumbuhan belanja merupakan sebuah ukuran keuangan guna mengevaluasi keahlian aktivitas pendanaan disuatu wilayah dalam hal memperkuat kinerja keuangan di setiap periodenya dengan cara membandingkan pengeluaran dan pendapatan. Sehingga rasio ini dimanfaatkan sebagai alat ukur untuk melihat seberapa besar kemampuan di suatu wilayah dalam meningkatkan kesuksesan yang telah dicapai di setiap periodenya.

$$\text{PB Th } t = \frac{\text{Belanja Th } t - \text{Belanja Th } (t - 1)}{\text{Belanja Th } (t - 1)} \times 100\%$$

Analisis rasio pertumbuhan belanja menghasilkan kriteria evaluasi sebagai berikut. Pertama, Apabila Pertumbuhan belanja kurang dari Pertumbuhan pendapatan, dapat diasumsikan bahwa kinerja belanjanya dinilai sudah **baik**. Kedua, Apabila Pertumbuhan belanja lebih dari Pertumbuhan Pendapatan, dapat diasumsikan bahwa kinerja belanjanya masih **kurang baik**

### Rasio BMTB

Dalam analisis rasio ini (Mahmoudi, 2010) memberikan pendapat bahwa rasio ini dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan terkait tentang seberapa besar porsi anggaran belanja yang dipergunakan untuk belanja modal pada tahun anggaran dalam setiap periode tertentu. Sehingga perhitungan dari analisis ini dapat digunakan untuk melihat seberapa banyaknya anggaran belanja modal yang dibandingkan dengan total belanja di suatu pemerintahan. Penghitungan dalam analisis ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio BMTB} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Target Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria rasio BMTB:

1. Rasio BMTB > 5%, diasumsikan bahwa belanja modal tergolong sudah baik
2. Rasio BMTB < 5%, diasumsikan bahwa belanja modal tergolong masih kurang baik

### Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Mahmudi (2016) mengatakan bahwa dalam analisis pengukuran belanja ini, dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam kepentingan manajemen internal pemerintah sebagai pengendalian anggaran pendanaan.

$$\text{Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria:

1. Jika rasio BL lebih dari Rasio BTL menandakan kinerja BL tergolong **baik**
2. Sebaliknya, jika rasio BL kurang dari rasio BTL menandakan kinerja BL masih tergolong **kurang baik**

### Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Dalam analisisnya, rasio ini berguna sebagai tolak ukur keahlian suatu wilayah dalam mengumpulkan pajak yang ditargetkan oleh anggaran yang ada. Dapat menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kriterianya yakni: Pertama, Tingkat kemampuan lebih dari 100%, dapat dikategorikan sudah sangat efektif. Kedua, Tingkat kemampuan sekitar 90% sampai dengan 100%, dapat dikategorikan efektif. Ketiga, Apabila kemampuan sekitar 80% sampai dengan 90%, dapat dikategorikan masih cukup efektif. *Keempat*, Tingkat kemampuan sekitar 60% – 80%, dikategorikan sangat kurang efektif.

### Rasio Efisiensi PAD

Dalam analisis rasio ini berfungsi dalam mengetahui prosentase tingkat biaya output untuk memperoleh PAD dari perbandingan antara biaya *output* dengan *income*. Rasio efisiensi PAD penting dalam sebuah manajemen keuangan daerah, karena dapat memberikan gambaran langsung tentang kinerja dan potensi pengelolaan pendapatan yang lebih baik. Rasio efisiensi PAD penting dalam sebuah manajemen keuangan daerah, karena dapat memberikan gambaran langsung terkait kinerja dan potensi pengelolaan pendapatan yang lebih baik.

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 1. Kategori Nilai Efisien PAD**

<i>Biaya Pemerolehan PAD terhadap Realisasi Penerimaan PAD</i>	<i>Efisiensi PAD</i>
< 10,00%	Sangat Efisien
10,01% - 20,00%	Efisien
20,01% - 30,00%	Cukup Efisien
30,01% - 40,00%	Kurang Efisien
> 40,00%	Tidak Efisien

Sumber: data diolah

### Rasio Efektivitas PAD

Analisis ini dapat menyimpulkan sejauh mana kemampuan wilayah daerah dalam memperoleh penerimaan PAD agar memenuhi target yang telah ditetapkan. Perhitungan dalam analisis ini dengan membandingkan perencanaan dana perolehan PAD dengan target atau anggaran PAD sebelumnya. Sehingga pengukuran ini dapat menganalisis seberapa efektif suatu wilayah dalam menghimpun pendapatan asli yang anggarkan guna membiayai berbagai program pemerintah dan pelayanan publik. Dapat menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Pengkategorian Rasio Efektivitas PAD:

1. Jika mendapatkan nilai  $\leq 100\%$ , menandakan bahwa masih tergolong kategori tidak efektif.
2. Jika mendapatkan nilai  $= 100\%$ , menandakan bahwa sudah tergolong kategori efektivitas berimbang.
3. Jika memperoleh nilai  $> 100\%$ , menandakan sudah tergolong kategori efektif.

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode *mix method* atau penelitian metode campuran, adalah pendekatan yang menggabungkan metode kuantitatif dan metode kualitatif dalam satu rangkaian penelitian. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena dengan

memanfaatkan kelebihan masing-masing pendekatan. Data penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang cara perolehannya menggunakan dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, foto, film, rekaman, dan lain-lain yang memperluas data. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti suatu kondisi ilmiah yang menjadikan penelitian sebagai instrument penting dalam penelitian. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang merupakan sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini. Informasi yang dipakai untuk penelitian ini yaitu laporan realisasi anggaran pada periode 2019-2023. Dalam penelitian ini, prosedur dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan information yang didasarkan pada laporan tahunan oleh Badan Pusat Statistika Kabupaten Jombang 2019- 2023.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Pengukuran Rasio Keuangan:

#### Analisis Rasio Derajat Desentralisasi

Berdasarkan Tabel 1 rasio derajat desentralisasi di Kab. Jombang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 derajat desentralisasi cukup tinggi sebesar 24,15% dibandingkan tahun yang lain. Pada tahun 2023 derajat desentralisasi mengalami penurunan dari 24,15% ditahun 2022 menjadi 21,18% di tahun 2023. Rasio Derajat Desentralisasi di Kab. Jombang selama periode tahun 2019-2023 dengan kinerja yang cukup. Ditunjukkan dengan nilai rata-rata rasio Derajat Desentralisasi 20,96% yang lebih dari 20,01% selama tahun 2019-2023.

#### Analisis Kemandirian Keuangan

Tabel 2 menunjukkan rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi di tahun 2021 sebesar 30% namun pada tahun 2022 mengalami penurunan

sebesar 3% dari tahun sebelumnya. Jadi rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 sebesar 25,3% yang tergolong pada kemampuan keuangan kategori rendah

### Analisis Pertumbuhan Belanja

Tabel 3 menunjukkan pada tahun 2019 – 2020 jumlah total belanja mengalami penurunan dari 2.649.774.257,028 menjadi 2.527.283.320,000. Begitupun dengan pertumbuhan belanja yang juga mengalami penurunan dari 12,56% menjadi -4,62%, dengan kategori kinerja “Kurang Baik” karena pertumbuhan pendapatan lebih kecil dari pertumbuhan belanja. Namun pada tahun 2021 ke 2022 total belanja dan pertumbuhan belanja mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari 2.785.980.355,230 menjadi 2.878.909.756.471,00, dan pertumbuhan belanja dari 10,24% menjadi 103,23% dengan kategori kinerja “Baik” ditahun 2021.

Selanjutnya, pada tahun 2022 ke 2023 total belanja mengalami kenaikan dari 2.878.909.756.471,00 ke 2.940.520.477.931,19

dengan pertumbuhan belanja sebesar 103,23% turun menjadi 2,14%, Artinya, tahun 2023 masuk dalam kategori kinerja yang “Baik” karena pertumbuhan belanja lebih kecil dari pertumbuhan pendapatan. Sehingga rata rata yang dapat diambil pada Belanja yaitu sebesar Rp 971.624.563.548,024. Pertumbuhan pendapatan sebesar 23,68% kurang dari pertumbuhan belanja 24,71%, sehingga memiliki kinerja yang “Kurang Baik”.

### Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Berdasarkan Tabel 4 pada tahun 2020 rasio belanja modal mengalami penurunan. Dari 14,15% ditahun 2019 menjadi 9,64% di tahun 2020. Mulai bangkit lagi pada tahun 2021 menjadi 13,36%. Lalu pada tahun 2022 12,45%. Dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 8,30%. Rasio belanja modal terhadap total belanja di Kab. Jombang selama periode tahun 2019-2023 memiliki kinerja yang baik. Ditunjukkan dengan nilai rata-rata rasio BMTB 11,58% yang lebih dari 5% selama tahun 2019-2023.

**Tabel 2. Rasio Derajat Desentralisasi Kab. Jombang Tahun 2019-2023**

Tahun	Belanja (Rp)	Pertumbuhan Pendapatan (%)	Pertumbuhan Belanja (%)	Kinerja
2018	2.354.108.953,698	-	-	-
2019	2.649.774.257,028	6,19%	12,56%	Kurang baik
2020	2.527.283.320,000	-4,86%	-4,62%	Kurang baik
2021	2.785.980.355,230	13,19%	10,24%	Baik
2022	2.878.909.756.471,00	92,78%	103,23%	Kurang baik
2023	2.940.520.477.931,19	11,08%	2,14%	Baik
Rata-rata	971.624.563.548,024	23,68%	24,71%	Kurang baik

**Tabel 3. Rasio Kemandirian Keuangan Kab. Jombang Tahun 2018-2023**

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Eksteren (Rp)	KK (%)	Kinerja
2018	438.197.175.438.60	2,074,589,454,407.00	21	Rendah sekali
2019	476.662.933.476.46	2,191,712,835,933.00	22	Rendah sekali
2020	468.627.918.703.89	2,069,868,553,574.00	23	Rendah sekali
2021	665,844,012,375.24	2,217,682,206,668.00	30	Rendah
2022	456,047,997,561.13	1,707,735,912,494.00	27	Rendah
2023	628,159,617,727.36	2,585,856,950,168.00	29	Rendah
Rata2	465.731.678.468.44	2.307.698.853.540.00	25,3%	Rendah

Sumber: Badan Pusat Statistika Kab. Jombang Tahun 2019-2023

**Tabel.4 Rasio BMTB Kab. Jombang Tahun 2019-2023**

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	BMTB (%)	Kinerja
2019	374.841.005,380	2.649.774.257,029	14,15%	Baik
2020	243.636.239	2.527.283.320	9,64%	Baik
2021	372.351.774,10	2.785.980.355,24	13,36%	Baik
2022	358.483.878.749,00	2.878.909.756.471,00	12,45%	Baik
2023	244.054.491.039,92	2.940.520.477.931,19	8,30%	Baik
Rata-rata	120.696.839.761,48	1.165.478.654.466,897	11,58%	Baik

**Tabel 5 Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung**

Tahun	Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Total Belanja (Rp)	BL (%)	BTL (%)	Kinerja
2019	1.151.817.886,935	1.497.956.370,093	2.649.774.257,029	43,46	56,53	Kurang baik
2020	980.414.666	1.546.868.655	2.527.283.320	38,79	61,20	Kurang baik
2021	1.149.163.807,52	1.636.816.547,71	2.785.980.355,24	41,24	58,75	Kurang baik
2022	2.152.727.040.315	726.182.716.156	2.878.909.756.471	74,77	25,22	Baik
2023	2.338.371.096.878,1	602.149.381.053	2.940.520.477.931,19	79,52	20,47	Baik
Rata-rata	898.875.906.710,71	266.323.711.356,36	1.165.478.654.466,8	55,55	44,43	Baik

**Tabel.6 Rasio Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio Efektifitas	Kinerja
2019	153,99 M	144,92 M	94%	Efektif
2020	235.267,33 M	179.170,49 M	76%	Kurang efektif
2021	217.504,16 M	199.306,00 M	91%	Efektif
2022	230.273,92 M	238.828,92 M	96%	Efektif
2023	255.696,93 M	255.053,32 M	103%	Sangat efektif
Rata-rata			92%	Efektif

Sumber: Badan Pusat Statistika Kab. Jombang Tahun 2019-2023

### Analisis Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Tabel 5 menunjukkan rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung Kab. Jombang pada tahun 2019 – 2023 memiliki kinerja yang baik. Hasil perhitungan rata-rata menunjukkan bahwa nilai rasio belanja langsung lebih besar dari pada nilai rasio belanja tidak langsung. Dengan total nilai belanja langsung 55,55% dan nilai belanja tidak langsung 44,43%.

### Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak

Tabel 6 menunjukkan rata-rata rasio efektifitas penerimaan pajak Kabupaten Jombang pada tahun 2019-2023 tergolong

efektif dengan tingkat rasio 92%. Dapat dilihat bahwasannya rasio tersebut menurun pada tahun 2020 sebanyak 12% yang kemudian terus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2023. Artinya, kinerjanya Kabupaten Jombang dalam mengelola pajak tergolong baik karena mampu mengumpulkan pajak guna merealisasikan PAD dengan baik sesuai dengan jumlah yang ditargetkan.

### Analisis Efisiensi PAD

Tabel 7 menunjukkan tahun 2019 - 2023 jumlah rasionya lebih dari 40,00% semua. Dengan rasio itu, dapat disimpulkan bahwa rasio efisiensi PAD Kabupaten Jombang pada tahun 2019 – 2023 tergolong tidak efisien.

Dengan jumlah rata-rata rasio adalah 89,23%. Artinya, Kabupaten Jombang masih tergolong tidak efisien dan kurang baik dalam merealisasikan PAD sesuai dengan yang direncanakan.

### Analisis Efektivitas PAD

Tabel 8 menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD Kabupaten Jombang pada tahun 2019 – 2023 tergolong efektif, dengan jumlah rata-rata rasio sejumlah 113,64%. Dari 2019 – 2023, semua tergolong baik yaitu dengan jumlah rasio di atas 100% semua. Hal ini menandakan bahwasannya kinerja Kabupaten Jombang sudah baik dan sudah mampu secara efektif dalam mengumpulkan PAD sesuai target yang telah ditetapkan.

### Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut ini. Pertama, dapat dilihat dari rata-rata analisis derajat desentralisasi tahun 2019 – 2023 Kabupaten Jombang adalah cukup dengan rata-rata 20,96%. Kedua, analisis rasio kemandirian keuangan dengan rata-rata 25,3%. Artinya, kemandirian keuangan Kabupaten Jombang selama tahun 2019 – 2023 yaitu rendah. Ketiga, rasio pertumbuhan belanja, dapat dilihat bahwa

pada Kabupaten Jombang rasio memiliki kinerja kurang baik karena pada rata-rata menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja memiliki nilai lebih besar dari pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan belanja mencapai 24,71% dan pertumbuhan pendapatan 23,68%. Keempat rasio belanja modal terhadap belanja daerah. Pada rasio ini Kabupaten Jombang cukup stabil karena pada tahun 2019 – 2023 terus mendapatkan kinerja baik dengan nilai rata-rata 11,58%.

Kelima, rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pada rasio ini memiliki kinerja yang baik dengan nilai rata-rata pada belanja langsung 55,55% dan belanja tidak langsung 44,43%. Lalu yang keenam adalah rasio efektivitas penerimaan pajak daerah, untuk rasio ini memiliki nilai rata-rata 92% dengan kinerja efektif. Artinya, pemerintah Kabupaten Jombang cukup baik dalam merealisasikan pendapatan asli daerah. Ketujuh, rasio efisiensi PAD yang mencapai rata-rata 89,23% yang berarti pada tahun 2019 – 2023 memiliki kinerja tidak efisien. Lalu yang terakhir ada rasio efektivitas PAD. Pada tahun 2019 – 2023 efektivitas PAD menunjukkan data yang stabil dengan nilai rata-rata 113,64% dengan kinerja efektif.

**Tabel 7. Rasio Efisiensi PAD Kab. Jombang**

Tahun	Biaya Pemerolehan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efisiensi	Kinerja
2019	439,13 M	476,66 M	92,12%	Tidak Efisien
2020	467,36 M	468,63 M	99,72%	Tidak Efisien
2021	477,85 M	665,84 M	71,76%	Tidak Efisien
2022	509,82 M	522,53 M	97,56%	Tidak Efisien
2023	534,59 M	628,70 M	85,03%	Tidak Efisien
Rata-rata	485,75 M	552,47 M	89,23%	Tidak Efisien

**Tabel 8. Rasio Efektivitas PAD 2019 – 2023**

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Efektivitas PAD	Kinerja
2019	476,66 M	439,13 M	108,54%	Efektif
2020	468,63 M	467,36 M	100,27%	Efektif
2021	665,84 M	477,85 M	139,34%	Efektif
2022	522,53 M	509,82 M	102,49%	Efektif
2023	628,70 M	534,59 M	117,60%	Efektif
Rata-rata	552,47 M	485,75 M	113,64%	Efektif

Sumber: Badan Pusat Statistika Kab. Jombang Tahun 2019-2023

Jadi, dengan menggunakan delapan rasio tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya kinerja keuangan di Kabupaten Jombang pada tahun 2019 - 2023 tergolong baik. Namun, terdapat beberapa kinerja dari Kabupaten Jombang yang realitanya memang kurang baik. Diantaranya adalah dalam hal kemandirian keuangan yang rendah, dan juga efektifitas atau realisasi dalam PAD yang tidak sesuai target.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Awani, F.M. dan Hariani, S. 2021. Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 95-102.  
<https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>.
- BPKAD Kabupaten Jombang. 2023. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jombang menurut Data dari Laporan Kinerja Instransi Pemerintahan (LKIP)
- Irnawati, dkk. 2023. Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 4(3), 403-416 <https://e-jurnal.nobel.ac.id>
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press Yogyakarta.
- Patarai, I.M. 2017. *Kinerja Keuangan Daerah*. De La Macca. Makassar.
- Rohmad, M., Isma, A., dan Ramli, F. 2023. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo. *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, 5(1), 17-35.  
<https://doi.org/10.55606/ai.v5i1.285>.

Siswanto dan Maylani, D.A. 2022. Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 11(1), 130-138, <https://jurnal.uny.ac.id>